BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat saat ini masih menghadapi permasalahan ekonomi domestik, sehingga dapat dikatakan pasar dunia sedang lemah dan mengalami masa-masa sulit. Namun, ekonomi Indonesia masih tangguh dalam menghadapi kecenderungan krisis ekonomi global saat ini karena posisi dan kondisi ekonomi nasional cukup kuat. Ketahanan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari struktur perekonomian Indonesia yang memiliki permintaan domestik yang tinggi terutama konsumsi rumah tangga sehingga dapat meminimalkan dampak perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap kuat meskipun kekhawatiran terhadap prospek ekonomi dunia masih tinggi (Bayu Krisnamurthi, 2011). Meskipun kondisi perekonomian Indonesia masuk dalam kategori ekonomi yang sehat, namun krisis ekonomi yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat membuat Indonesia harus tetap waspada (Hatta Rajasa, 2011).

Krisis ekonomi yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat berimbas pada perekonomian Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2011 tercatat mengalami perlambatan. Meski tetap tumbuh namun pertumbuhannya melambat. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2011 tercatat sebesar 3,5 persen dibandingkan kuartal II-2011 atau mencapai 6,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Slamet Sutomo, 2011).

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah pasti akan berdampak pada melambatnya kinerja perdagangan internasional. Pasalnya, melambatnya pertumbuhan ekonomi akan menurunkan permintaan dan harga produk komoditas. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya nilai ekspor dan impor pada periode tersebut. Ekspor pada triwulan III-2011 tercatat tumbuh 5,2 persen dari Rp 300,2 triliun menjadi Rp 315,8 triliun. Dibandingkan dengan triwulan II-2011, pertumbuhan tersebut menurun sebesar 7,2 persen. Kondisi serupa terjadi terhadap impor. Pada triwulan II-2011, impor tumbuh 6,5 persen, sedangkan pada triwulan III-2011 pertumbuhannya melambat menjadi hanya 2,4 persen. Jika hal ini terjadi, bisa jadi target penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional yaitu bea masuk dan bea keluar tak akan tercapai (Fadhil Hasan, 2011).

Untuk mengantisipasi hal ini, Indonesia harus terus mengembangkan potensi pasar-pasar ekspor baik ekspor migas maupun non migas yang baru ke kawasan lain sehingga ekspor tidak terkena dampak yang luas akibat krisis tersebut. Tujuan ekspor ke Amerika Serikat dan Eropa cukup mengkhawatirkan karena krisis yang saat ini tengah terjadi. Pelaku ekspor bisa mengembangkan pasar ke kawasan lain seperti Timur Tengah, Afrika, Amerika Tengah dan Amerika Selatan (Gita Wirjawan, 2011). Sedangkan China dan India akan tetap menjadi tujuan ekspor Indonesia karena sekalipun terjadi perlambatan, ekonomi dua negara Asia itu diperkirakan masih tetap tumbuh cukup tinggi (Perry Warjiyo, 2011). Walaupun strategi mengembangkan potensi pasar-pasar ekspor baik ekspor migas maupun non migas yang baru ke kawasan lain ini akan sulit mengingat

produk Indonesia masih relatif baru di pasar tersebut (Edimon Ginting, 2011). Selain itu karakteristik produk ekspor Indonesia yang didominasi oleh produk sumber daya alam, atau bahan mentah, turut menjaga ekspor nasional dari dampak krisis yang lebih jauh (Perry Warjiyo, 2011).

Salah satu upaya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk mendorong dan meningkatkan ekspor khususnya ekspor non migas adalah dengan memberikan sebuah fasilitas yang disebut Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) kepada perusahaan-perusahaan sebagai pelaku bisnis. Sebenarnya fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) bukan hal baru yang kewenangannya kini dijalankan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Fasilitas tersebut memang sejak awalnya ada, yaitu pada jaman panjajahan Belanda dulu. Pada saat itu, fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri di Indonesia sehingga perekonomian dapat menjadi lebih baik (Adams Rudhy Kembuan, 2008).

Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sebenarnya sangat membantu pengusaha dalam menjalankan usahanya, karena selain mereka dapat meningkatkan nilai produksinya, juga dapat mengatur keuangan perusahaan dengan sebaik mungkin. Selain itu fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dipandang cukup meringankan pengusaha sehingga mereka dapat mengatur *cash flow* dengan baik. Dengan adanya fasilitas tersebut, perusahaan-perusahaan besar yang saat itu ada dan hingga kini masih berjalan baik, seperti pabrik sepatu Bata, PT. Honda, Indomobil, Toyota, Nestle, Unilever, Bridgestone, pabrik ban Goodyear, Yamaha, dan lain-lain langsung memanfaatkannya dan

memberikan keuntungan bagi mereka, baik untuk persaingan dengan negara lain, maupun untuk efisiensi produksi yang saat itu mereka rasakan cukup berat (Adams Rudhy Kembuan, 2008).

Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) ini terbagi menjadi dua.

1. Fasilitas pembebasan yang merupakan fasilitas pembebasan bea masuk dan atau cukai serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut atas impor barang dan atau untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang hasilnya untuk tujuan ekspor atau diserahkan ke kawasan berikat kemudian di ekspor kembali.
2. Fasilitas pengembalian yang merupakan pengembalian bea masuk dan atau cukai yang telah dibayar atas impor barang lain yang hasilnya untuk tujuan ekspor atau diserahkan ke kawasan berikat (Kusdirman Iskandar, 2008).

Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian, perusahaan wajib memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk mendapatkan Nomor Induk Perusahaan (NIPER), perusahaan harus mengajukan Data Induk Perusahaan (DIPER) secara lengkap dan benar kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara elektronik (Adams Rudhy Kembuan, 2008).

Namun hingga saat ini fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) masih mengalami beberapa kendala. *Pertama* jaminan. Selama ini tidak ada

keseragaman bentuk, jenis, jangka waktu serta dasar hukum mengenai jaminan, seperti *Customs Bond*, diberikan selama jangka waktu penangguhan ditambah 30 hari, dan 14 hari setelah jatuh tempo harus segera dicairkan, sedangkan jaminan bank 5 hari setelah jatuh tempo harus dicairkan. *Kedua*, kendala pada monitoring dan pengawasan. Saat ini *data base* pada TIM Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) belum di *update* lagi, sehingga monitoring terhadap Data Induk Perusahaan (DIPER)/Nomor Induk Perusahaan (NIPER) dan jaminan tidak optimal. Ketiga, aplikasi. Saat ini belum terintegrasinya seluruh dokumen pemberitahuan pabean secara elektronik, belum sempurnanya aplikasi monitoring jaminan antara Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang akan dicairkan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang masih dalam proses BCL.KT01, belum tersedianya aplikasi jaminan terhadap importir yang terkena bea masuk anti *dumping* dan yang mendapat pembebasan cukai, dan belum berjalannya rekonsiliasi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan *outward manifes*. (Kusdirman Iskandar, 2008).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai prosedur pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) baik fasilitas pembebasan maupun fasilitas pengembalian yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan sebagai pelaku bisnis dengan mengambil judul **"Prosedur Pemberian Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Barat".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Penulis melakukan kerja praktek pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah kerja praktek.

a. Maksud Kerja praktek

   Maksud dari kerja praktek adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai prosedur pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

b. Tujuan Kerja Praktek

   Adapun tujuan penulis dalam melaksanakan kerja praktek yaitu :

   1. Untuk mengetahui prosedur pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
   2. Untuk mengetahui kendala pada prosedur pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Adapun kegunaan kerja praktek ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai prosedur pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

b. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat

Dapat menjadi masukan yang dapat dipertimbangkan dalam hal mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan dalam prosedur pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

c. Bagi Pihak Lain

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak lain khususnya mengenai prosedur pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat serta dapat menjadi bahan referensi dalam pembuatan laporan ilmiah lainnya.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, penulis menggunakan metode *Block Release,* yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Penulis melakukan kerja praktek di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat mulai tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan 3 Agustus 2011.

Agar dapat tersusunnya laporan kerja praktek ini dilakukan beberapa teknik pengumpulan data, adapun teknik-teknik yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

   Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan cara diantaranya sebagai berikut :

   a. Pengamatan (*Observation*)

      Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung tentang kegiatan-kegiatan yang terjadi pada perusahaan. Observasi dilaksanakan pada bagian fasilitas kepabeanan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

   b. Wawancara (*Interview*)

      Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tatap muka langsung dengan pihak yang bersangkutan kemudian dilakukan tanya jawab secara lisan sehingga diperoleh data-data yang diperlukan untuk membantu dalam memecahkan masalah yang akan dibahas. Wawancara dilakukan kepada para pegawai bagian fasilitas kepabeanan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

   c. Dokumentasi (*Document*)

      Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan tertulis berupa data-data yang diperoleh dari bagian fasilitas kepabeanan.

2. Studi Pustaka (*Library Research*)

   Merupakan suatu teknik yang mengumpulkan data yang dipergunakan untuk memperoleh data secara teoritis yaitu dengan mempelajari buku, catatan dan literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan laporan kerja praktek ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Penulis melakukan kerja praktek pada bagian fasilitas kepabeanan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat yang berlokasi di Gedung Keuangan Negara Lantai III, Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung.

Adapun waktu kerja praktek dilaksanakan mulai tanggal 4 Juli 2011 hingga 3 Agustus 20011.

Tabel 1.1
Aktivitas Kerja praktek

No	Hari	Waktu	Keterangan
1	Senin- Jumat	08.00-12.00 WIB	Kegiatan aktivitas KP
2	Sabtu- Minggu	-	Libur

Tabel 1.2
Aktivitas Kanwil DJBC Jawa Barat

No	Hari	Waktu	Keterangan
1	Senin- Jumat	08.00-16.00 WIB 12.00-13.00 WIB	Kegiatan aktivitas kantor Istirahat
2	Sabtu- Minggu	-	Libur

Tabel 1. 3
Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

Tahap	Kegiatan	Juni 2011	Juli 2011	Agst 2011	Sept 2011	Okt 2011	Nov 2011	Des 2011
1	**Tahap Persiapan :**							
	1. Mengambil surat permohonan KP	■						
	2. Mencari tempat KP	■						
2	**Tahap Pelaksanaan :**							
	1. Mengajukan surat permohonan KP ke perusahaan	■						
	2. KP di perusahaan		■	■				
3	**Tahap Pelaporan :**							
	1. Menyusun laporan KP				■	■	■	
	2. Bimbingan KP					■	■	■
	3. Penyempurnaan laporan KP							■
	4. Sidang KP							■